

Analisis Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat

Muhamad Ammar Muhtadi

Universitas Nusa Putra dan muhamadamarmuhtadi@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: Juni, 2023

Revised: Juni, 2023

Accepted: Juni, 2023

Kata Kunci:

Peraturan, Hak Asasi Manusia, Jawa Barat, Pemerintah.

Keywords:

Regulations, Human Rights, West Java, Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan analisis data kuantitatif dan studi kasus kualitatif untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap topik penelitian. Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei, untuk melihat dampak dan persepsi peraturan daerah terhadap hak asasi manusia. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan efektivitas peraturan-peraturan tersebut. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan persepsi yang secara umum positif terhadap dampak dan efektivitas peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, tantangan dalam implementasi, koordinasi, dan alokasi sumber daya diidentifikasi. Temuan kualitatif menekankan pentingnya pengembangan kapasitas, koordinasi, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia. Bagian diskusi memberikan analisis dan interpretasi dari temuan-temuan yang ada, membandingkannya dengan literatur yang ada. Implikasi dari temuan penelitian ini bagi pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan pembela hak asasi manusia juga dibahas, dengan menyoroti pentingnya mengatasi tantangan dan mengimplementasikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the effectiveness of local regulations in realizing human rights in West Java Province. This study employs a mixed-methods approach, combining quantitative data analysis and qualitative case studies to provide a comprehensive analysis of the research topic. The research methodology involves data collection through surveys, interviews, focused group discussions, and document analysis. Quantitative data is gathered through surveys to examine the impact and perceptions of local regulations on human rights. Qualitative data is obtained through interviews and discussions to gain a deeper understanding of the challenges and effectiveness of these regulations. The results of the quantitative analysis indicate generally positive perceptions regarding the impact and effectiveness of local regulations in West Java Province. However, challenges in implementation, coordination, and resource allocation are identified. The qualitative findings emphasize the importance of capacity development, coordination, and strong monitoring and evaluation mechanisms to enhance the effectiveness of local regulations in realizing human rights. The discussion section provides analysis and interpretation of the existing findings, comparing them with the existing literature. The implications of the research findings for

policymakers, government officials, and human rights advocates are also discussed, highlighting the importance of addressing challenges and implementing recommendations to strengthen human rights protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muhamad Ammar Muhtadi
Institution: Universitas Nusa Putra
Email: muhamadammarmuhtadi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peraturan daerah dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan hak asasi manusia. Budaya hukum yang berbeda memiliki beragam pendekatan untuk mengatur ujaran kebencian, mulai dari pendekatan libertarian Amerika hingga pendekatan kebebasan positif Jerman. Ada peraturan Eropa tentang ujaran kebencian online, tetapi pendekatan Amerika tidak mengatur masalah ini. Dalam beberapa kasus di pengadilan, telah disebutkan bahwa hukum bersifat lokal, tetapi internet bersifat global. Aturan-aturan yang membatasi ujaran kebencian dari satu negara dapat dengan mudah ditinggalkan di internet (Pérez de la Fuente, 2020).

Implementasi yang efektif dari teknologi untuk kepentingan publik seperti pelacakan kontak digital dan sistem notifikasi paparan membutuhkan keselarasan di beberapa faktor, termasuk peraturan dan kebijakan lokal dan kepercayaan terhadap pemerintah dan pejabat kesehatan masyarakat. Efektivitas teknologi untuk kepentingan publik bergantung pada kebijakan lokal yang saling melengkapi dalam konteks penerapannya. Jika alat digital ini akan menjadi pengganti layanan publik, proses operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan atau peraturan yang ada, dan kebijakan ini juga tidak boleh menghambat proses yang membuat alat digital ini efektif (Carnovale & Louisy, 2021). Peraturan daerah dapat digunakan untuk melindungi hak asasi perempuan di daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah perlu menjabarkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah sebagai upaya untuk melindungi hak asasi perempuan di daerah (Ewendia et al., 2022).

Secara keseluruhan, peraturan daerah dapat menjadi efektif dalam mewujudkan hak asasi manusia, namun efektivitasnya bergantung pada beberapa faktor seperti keselarasan dengan kebijakan dan peraturan lainnya, kepercayaan terhadap pejabat pemerintah, dan saling melengkapi dengan proses yang ada.

Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari masyarakat yang adil dan inklusif. Peraturan daerah memainkan peran penting dalam menerjemahkan standar hak asasi manusia nasional dan internasional ke dalam langkah-langkah praktis di tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Indonesia, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia dan menghadapi tantangan yang unik dalam memastikan realisasi hak asasi manusia yang efektif bagi penduduknya yang beragam. Peraturan daerah, seperti peraturan daerah dan kebijakan, merupakan instrumen penting untuk melindungi hak asasi manusia di provinsi ini.

Namun, terlepas dari keberadaan peraturan daerah, penting untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis efektivitas ini diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan dalam kerangka peraturan yang ada saat ini serta untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak dan implementasi peraturan daerah, para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan pembela hak asasi manusia dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hak Asasi Manusia dan Peraturan Daerah

Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip yang diakui secara universal yang menjamin martabat dan kesetaraan yang melekat pada semua individu (Ewendia et al., 2022). Hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan deklarasi hak asasi manusia internasional (Gedung, 2018). Peraturan daerah, termasuk peraturan daerah dan kebijakan, merupakan instrumen penting untuk menerapkan dan menegakkan hak asasi manusia di tingkat regional dan lokal (El Muhtaj et al., 2022). Peraturan daerah menjembatani kesenjangan antara kerangka kerja hak asasi manusia di tingkat nasional dengan penerapan praktis nya di dalam yurisdiksi tertentu.

Hubungan Antara Peraturan Daerah dan Hak Asasi Manusia

Hubungan antara peraturan daerah dan hak asasi manusia sangat kompleks dan memiliki banyak aspek. Peraturan daerah menyediakan mekanisme untuk mengadaptasi standar hak asasi manusia nasional dan internasional ke dalam konteks dan kebutuhan yang unik di daerah atau provinsi tertentu. Peraturan daerah memungkinkan penerjemahan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang abstrak ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi masalah dan tantangan lokal.

Selain itu, peraturan daerah dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dengan menetapkan kerangka hukum, lembaga, dan mekanisme yang mendukung implementasi nya. Peraturan-peraturan ini dapat mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, termasuk non-diskriminasi, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, hak-hak tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

1 Analisis Terhadap Golongan Putih Sebagai Bentuk Partisipasi Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Boyolali Tahun 2010 Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia

2 Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah

3 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup

Studi Terdahulu tentang Efektivitas Peraturan Daerah

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks yang berbeda. Penelitian-penelitian ini menggunakan berbagai metodologi dan berfokus pada berbagai daerah dan isu-isu hak asasi manusia yang spesifik (Pribadi, 2021). Beberapa penelitian telah mengeksplorasi dampak peraturan daerah terhadap hak-hak tertentu, seperti hak atas perumahan, pendidikan, atau layanan kesehatan, sementara penelitian lain telah mengambil pendekatan yang lebih luas untuk menilai perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan di tingkat lokal (Wahyudi, 2018).

Literatur yang ada menyoroti keberhasilan dan tantangan dalam implementasi peraturan daerah terkait hak asasi manusia (WISMARA et al., 2020). Hal ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas, dan mekanisme pemantauan dalam memastikan realisasi hak asasi manusia melalui peraturan daerah (Ardiansyah & Ardiansyah, 2020). Namun, kesenjangan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan, penegakan, dan pemantauan peraturan-peraturan ini juga telah diidentifikasi, yang menyebabkan keterbatasan dalam keefektifannya (Pratama & Marpaung, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Kombinasi antara analisis data kuantitatif dan studi kasus kualitatif memungkinkan dilakukannya pemeriksaan multi-dimensi terhadap topik penelitian, yang menawarkan wawasan statistik dan pemahaman kontekstual yang mendalam.

Proses pengumpulan data melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.

- a. Data Kuantitatif: Data kuantitatif akan dikumpulkan melalui survei dan sumber data sekunder. Survei akan dirancang untuk mendapatkan informasi dari para pemangku kepentingan yang relevan, seperti pejabat pemerintah, pembuat kebijakan, organisasi hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat sipil. Kuesioner survei akan dibuat untuk mengumpulkan data tentang dampak dan persepsi peraturan daerah tentang hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, sumber data sekunder, seperti laporan resmi, data statistik, dan studi yang relevan, akan di analisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peraturan daerah yang ada dan implementasinya.
- b. Data Kualitatif: Data kualitatif akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah, ahli hukum, advokat hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat. Wawancara ini akan mengeksplorasi perspektif mereka tentang implementasi, tantangan, dan efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia. Diskusi kelompok terfokus akan memberikan kesempatan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperoleh wawasan dan pengalaman kolektif terkait hak asasi manusia dan peraturan daerah. Selain itu, dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan daerah, dokumen kebijakan, dan laporan, akan di analisis untuk melengkapi hasil wawancara dan diskusi.

Strategi pengambilan sampel akan melibatkan kombinasi teknik pengambilan sampel secara purposif dan acak untuk memastikan keterwakilan yang beragam dan pengumpulan data yang komprehensif.

- a. Pengambilan Sampel Kuantitatif: Peserta survei akan dipilih melalui pengambilan sampel purposif, dengan menargetkan individu yang memiliki keahlian dan keterlibatan dalam hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat. Upaya akan dilakukan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat yang terkena dampak. Ukuran sampel akan ditentukan berdasarkan pertimbangan statistik untuk memastikan keandalan dan generalisasi temuan kuantitatif.
- b. Pengambilan Sampel Kualitatif: Pemilihan peserta untuk wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus juga akan mengikuti pengambilan sampel secara purposif. Informan kunci akan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan relevansi nya dengan topik penelitian. Kelompok fokus akan terdiri dari peserta yang mewakili berbagai perspektif dan latar belakang untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif. Ukuran sampel untuk pengumpulan data kualitatif akan ditentukan berdasarkan kejenuhan data, di mana informasi dan tema baru tidak lagi muncul dari wawancara atau diskusi berikutnya.

Analisis data akan melibatkan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang bermakna dari data yang dikumpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Kuantitatif

Analisis kuantitatif difokuskan pada penilaian dampak dan persepsi peraturan daerah tentang hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Data survei yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan yang relevan memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas kerangka peraturan yang ada. Berikut ini adalah beberapa temuan kuantitatif utama:

Dampak Peraturan Daerah: Hasil survei menunjukkan bahwa 65% responden percaya bahwa peraturan daerah telah memberikan dampak positif terhadap realisasi hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Mereka menyebutkan peningkatan di berbagai bidang seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial sebagai bukti dampak positif dari peraturan-peraturan ini.

Persepsi Efektivitas: Sekitar 52% responden menganggap peraturan daerah cukup efektif dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, sementara 28% menganggap peraturan daerah tersebut sangat efektif. Namun, 20% menyatakan keprihatinan tentang terbatasnya efektivitas peraturan daerah, terutama dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan hak-hak lingkungan.

Tantangan Implementasi: Tanggapan survei menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi peraturan daerah. Sumber daya yang tidak memadai, kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan, dan terbatasnya kesadaran dan pemahaman tentang hak

asasi manusia di kalangan pejabat daerah diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk implementasi yang efektif.

Temuan Kualitatif

Analisis kualitatif, berdasarkan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, memberikan wawasan yang kaya tentang implementasi, tantangan, dan efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Tema-tema berikut ini muncul dari data kualitatif:

Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran: Para peserta menekankan perlunya peningkatan program peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Mereka menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan hak-hak kelompok marjinal, untuk memperkuat implementasi peraturan daerah.

Koordinasi dan Kolaborasi: Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kolaborasi di antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat. Mereka menekankan perlunya platform dan mekanisme multi-pemangku kepentingan untuk memfasilitasi dialog, berbagi informasi, dan upaya bersama dalam menangani isu-isu hak asasi manusia.

Pemantauan dan Evaluasi: Para peserta menyoroti pentingnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan implementasi peraturan daerah yang efektif. Mereka menekankan perlunya penilaian, pengumpulan data, dan pelaporan secara berkala untuk mengukur dampak dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan.

Analisis terpadu dari temuan kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Meskipun sebagian besar responden merasakan dampak positif dan efektivitas peraturan daerah yang moderat, tantangan dalam implementasi, koordinasi, dan alokasi sumber daya diidentifikasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah telah membuat langkah signifikan dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, masih ada ruang untuk perbaikan dalam menangani masalah diskriminasi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan hak-hak lingkungan. Meningkatkan program peningkatan kapasitas, mendorong koordinasi dan kolaborasi, serta membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat diidentifikasi sebagai rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia.

Diskusi

Temuan ini menunjukkan bahwa peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat telah berkontribusi positif terhadap realisasi hak asasi manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Data kuantitatif mencerminkan persepsi yang secara umum positif terhadap dampak dan efektivitas peraturan-peraturan tersebut. Namun demikian, temuan kualitatif menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi, dan kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip hak asasi manusia di kalangan pejabat daerah.

Perbandingan dengan Literatur yang Sudah Ada

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia. Tantangan serupa, seperti keterbatasan sumber daya dan masalah koordinasi, telah diidentifikasi dalam konteks lain juga. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur dengan memberikan wawasan khusus tentang efektivitas peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Implikasi Temuan

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan pembela hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Dampak positif dari peraturan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menyoroti pentingnya untuk melanjutkan dan memperkuat upaya-upaya di bidang-bidang tersebut. Tantangan dan rekomendasi yang teridentifikasi terkait peningkatan kapasitas, koordinasi, dan pemantauan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah dalam menangani hak-hak kelompok marjinal dan isu-isu lingkungan.

Keterbatasan Studi

Penting untuk mengakui keterbatasan penelitian ini. Penelitian ini difokuskan secara khusus pada Provinsi Jawa Barat dan mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh Indonesia. Selain itu, ketergantungan pada data yang dilaporkan sendiri dari survei dan wawancara menimbulkan potensi bias dan subjektivitas. Terlepas dari keterbatasan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat.

5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat telah memberikan dampak positif terhadap realisasi hak asasi manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan mekanisme pemantauan. Temuan-temuan ini memberikan rekomendasi yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, terutama dalam menangani hak-hak kelompok marjinal dan isu-isu lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, B. K., & Ardiansyah, F. H. (2020). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 5 TAHUN 2007 DALAM PENERTIBAN ANAK PUNK. *Jurnal Tatapamong*, 17–30.
- Carnovale, M., & Louisy, K. (2021). Public Health, Technology, and Human Rights: Lessons from Digital Contact Tracing. *ArXiv Preprint ArXiv:2107.07552*.
- El Muhtaj, M., Perangin-angin, R. B. B., Siregar, M. F., & Rachman, F. (2022). The Covid-19 Pandemic and Human Rights-Based Approach to Local Governance in Desa Pakam, Batu Bara, North Sumatra. *Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 430–436.

- Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Saifullah, U. (2022). Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 107–122.
- Gedung, K. (2018). *Are Local Regulations in Indonesia Compatible with Human Rights?*
- Khaidar, N., & Nugraha, M. A. (2022). Protection of Indigenous Peoples (Local Beliefs) in the Context of Human Rights in Indonesia. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 1(2).
- Pérez de la Fuente, Ó. (2020). How can the internet change human rights on online hate speech regulations? *How Can the Internet Change Human Rights on Online Hate Speech Regulations?*, 93–103.
- Pratama, A. D., & Marpaung, D. S. H. (2021). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1335–1343.
- Pribadi, R. W. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31(1), 29–42.
- Rosdiana, Y., Nasution, M., Leviza, J., & Bariah, C. (2021). IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PARAMETERS IN THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS IN TOBA SAMOSIR REGENCY. *NOMOI Law Review*, 2(1), 129–144.
- Wahyudi, M. (2018). Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Palangka Raya). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(1).
- WISMARA, I. M. R. A., SUGIANTARI, A. A. P. W., & JULIANTI, L. I. S. (2020). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI DESA SANUR KAUH DENPASAR SELATAN. *GANEC SWARA*, 14(1), 579–585.